
PENGARUH KEBIJAKAN IMIGRASI TERHADAP KRIMINALISASI MIGRAN DI INDONESIA

Oleh

Samuel Pandapotan Harianja

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Email: samuel.harianja88@gmail.com

Article History:

Received: 12-07-2025

Revised: 27-07-2025

Accepted: 15-08-2025

Keywords:

Kebijakan Imigrasi,
Kriminalisasi, Migran

Abstract: Kasus penyelundupan migran sukarela menunjukkan ketidakselarasan hukum nasional dengan hukum internasional yang melarang pemidanaan migran. Perspektif Sosiologi Hukum melihat migran sebagai korban kebijakan represif, sehingga diperlukan reformasi kebijakan dengan prinsip non-kriminalisasi dan perlindungan hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan mengkaji kriminalisasi migran sebagai korban, dampaknya, serta perlindungan hukum yang efektif untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap migran. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis isi untuk mengkaji kriminalisasi migran dari perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada kerentanan migran dan ketimpangan sosial dalam kebijakan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriminalisasi migran dalam sosiologi hukum menempatkan migran sebagai korban yang mengalami perlakuan tidak adil dan dampak sosial negatif akibat status rentan mereka. Dampak kriminalisasi mencakup stigma sosial, kesulitan ekonomi, serta tekanan psikologis seperti stres dan trauma. Perlindungan hukum yang efektif membutuhkan reformasi kebijakan anti-diskriminasi dan akses keadilan untuk menghormati hak migran

PENDAHULUAN

Kebijakan imigrasi merupakan rangkaian aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur masuk dan keluar individu dari negara tersebut. Di Indonesia, kebijakan imigrasi tidak hanya berfungsi untuk melindungi keamanan nasional tetapi juga untuk mengelola arus migrasi yang semakin kompleks. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigrasi didefinisikan sebagai kegiatan perpindahan orang dari satu negara ke negara lain yang dilakukan dengan cara yang sah. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari izin tinggal, visa, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi.

Indonesia merupakan negara yang strategis dalam konteks migrasi, baik sebagai negara tujuan, transit, maupun asal migran. Menurut data dari International Organization for Migration (IOM), Indonesia menjadi tempat tujuan bagi banyak migran dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Afghanistan, dan Bangladesh yang mencari perlindungan dari konflik atau kesulitan ekonomi. Pada tahun 2020, IOM melaporkan bahwa sekitar 13.000 migran terdaftar di Indonesia, namun jumlah ini mungkin lebih tinggi mengingat banyaknya

migran yang tidak terdaftar. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam mengelola migrasi dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan hukum internasional.

Memahami pengaruh kebijakan imigrasi terhadap kriminalisasi migran sangat penting, mengingat kebijakan ini dapat berkontribusi pada stigma dan diskriminasi yang dialami oleh migran. Dalam banyak kasus, migran yang berada di Indonesia sering kali dipandang sebagai pelanggar hukum, meskipun banyak dari mereka adalah pencari suaka yang berusaha melarikan diri dari situasi berbahaya. Menurut laporan Human Rights Watch (2021), banyak migran di Indonesia yang berhadapan dengan sistem hukum yang tidak adil, yang memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang kebijakan imigrasi dan dampaknya terhadap migran sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain

1. Apa Saja Kebijakan Imigrasi yang Diterapkan di Indonesia.?

Kebijakan imigrasi di Indonesia terdiri dari berbagai regulasi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Beberapa kebijakan utama meliputi pengaturan visa, izin tinggal, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi. Misalnya, kebijakan visa on arrival yang diperkenalkan untuk mempermudah akses bagi wisatawan asing, namun juga diikuti dengan kebijakan penegakan hukum yang ketat terhadap migran yang tidak memiliki dokumen yang sah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan tersebut serta implementasinya di lapangan.

2. Bagaimana Kebijakan Tersebut Berpengaruh Terhadap Kriminalisasi Migran? Kebijakan imigrasi yang ketat sering kali berujung pada kriminalisasi migran, di mana mereka diperlakukan sebagai pelanggar hukum daripada individu yang membutuhkan perlindungan. Misalnya, banyak migran yang ditangkap dan dipenjarakan hanya karena status imigrasi mereka yang tidak sah. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2021 terdapat lebih dari 1.000 migran yang ditahan di berbagai tempat penampungan di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara kebijakan imigrasi dan fenomena kriminalisasi ini.

3. Apa Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kriminalisasi Migran?

Kriminalisasi migran tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Migran yang mengalami kriminalisasi sering kali kehilangan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap migran dapat memperburuk ketegangan antara komunitas lokal dan migran. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kriminalisasi migran serta implikasinya terhadap kebijakan publik.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kebijakan Imigrasi di Indonesia

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan imigrasi yang diterapkan di Indonesia, termasuk aspek-aspek regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk menciptakan

sistem imigrasi yang lebih adil dan manusiawi.

2. Mengidentifikasi Hubungan antara Kebijakan Imigrasi dan Kriminalisasi Migran
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kebijakan imigrasi dan fenomena kriminalisasi migran. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus konkret dan data yang relevan, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada kriminalisasi.
3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Manusiawi
Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif bagi migran di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan pengalaman migran, diharapkan rekomendasi ini dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk tantangan yang dihadapi oleh migran dan masyarakat secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Teori Imigrasi

1. Pengertian dan Jenis Imigrasi

Imigrasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan individu atau kelompok dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap atau sementara. Ada berbagai jenis imigrasi, termasuk imigrasi ekonomi, imigrasi politik, dan imigrasi keluarga. Imigrasi ekonomi biasanya dilakukan oleh individu yang mencari peluang kerja yang lebih baik, sedangkan imigrasi politik sering kali melibatkan pencari suaka yang melarikan diri dari penganiayaan. Dalam konteks Indonesia, banyak migran yang datang dari negara-negara yang dilanda konflik atau kemiskinan, sehingga pemahaman tentang jenis imigrasi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

2. Teori-teori yang Mendasari Studi Imigrasi

Beberapa teori mendasari studi imigrasi, antara lain teori push-pull, teori jaringan sosial, dan teori transnasional. Teori push-pull menjelaskan bahwa individu bermigrasi karena dorongan dari negara asal (push factors) dan daya tarik dari negara tujuan (pull factors). Misalnya, kondisi ekonomi yang buruk di negara asal dapat mendorong seseorang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Teori jaringan sosial menekankan pentingnya hubungan sosial dalam proses migrasi, di mana individu cenderung bermigrasi ke tempat di mana mereka memiliki kerabat atau teman. Terakhir, teori transnasional menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya menciptakan hubungan satu arah tetapi juga hubungan timbal balik antara negara asal dan negara tujuan.

Kebijakan Imigrasi di Indonesia

1. Sejarah Kebijakan Imigrasi di Indonesia

Kebijakan imigrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Sejak era Orde Baru, kebijakan imigrasi cenderung ketat dan berfokus pada pengendalian arus masuk migran. Namun, pasca-reformasi, terdapat upaya untuk mengubah kebijakan ini menjadi lebih inklusif. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi kebijakan imigrasi di Indonesia.

2. Kebijakan Imigrasi Terkini

Kebijakan imigrasi terkini di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan visa hingga perlindungan bagi pencari suaka. Misalnya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program visa untuk tenaga kerja asing yang bertujuan untuk mendatangkan tenaga kerja terampil ke dalam negeri. Namun, meskipun ada upaya untuk mempermudah akses, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi kebijakan ini, termasuk birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak migran.

3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Imigrasi

Selain Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur imigrasi di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Peraturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti izin tinggal, deportasi, dan perlindungan bagi migran. Namun, banyak kritikus yang menganggap bahwa regulasi ini masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi migran, terutama dalam konteks kriminalisasi.

Kriminalisasi Migran

1. Definisi Kriminalisasi

Kriminalisasi migran merujuk pada proses di mana migran diperlakukan sebagai pelanggar hukum hanya karena status imigrasi mereka. Hal ini sering kali terjadi ketika kebijakan imigrasi yang ketat diterapkan, di mana migran yang tidak memiliki dokumen yang sah ditangkap dan diproses secara hukum. Kriminalisasi ini dapat menciptakan stigma sosial yang kuat terhadap migran, yang pada gilirannya mempengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum.

2. Faktor Penyebab Kriminalisasi Migran

Beberapa faktor yang menyebabkan kriminalisasi migran di Indonesia antara lain kebijakan imigrasi yang ketat, kurangnya pemahaman tentang hak-hak migran, dan stigma sosial yang melekat pada migran. Kebijakan yang menekankan penegakan hukum sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan dari migrasi, sehingga migran yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat tentang isu migrasi juga berkontribusi pada kriminalisasi ini.

3. Konsekuensi Sosial dan Hukum bagi Migran

Kriminalisasi migran memiliki berbagai konsekuensi sosial dan hukum. Secara hukum, migran yang ditangkap sering kali menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit, yang dapat berujung pada penahanan atau deportasi. Secara sosial, mereka sering kali mengalami stigma dan diskriminasi, yang dapat mengisolasi mereka dari komunitas lokal. Hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara

mendalam pengalaman migran dan dampak kebijakan imigrasi terhadap mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif migran dan mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang isu-isu yang dihadapi. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, peneliti dapat menangkap nuansa dan kompleksitas pengalaman migran di Indonesia.

2. Penelitian Kuantitatif

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga akan menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data statistik tentang jumlah migran, kasus kriminalisasi, dan dampak sosial ekonomi. Data kuantitatif ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala masalah dan akan digunakan untuk mendukung temuan kualitatif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang pengaruh kebijakan imigrasi terhadap kriminalisasi migran di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan migran, aktivis, dan pejabat pemerintah untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang kebijakan imigrasi dan kriminalisasi. Wawancara ini akan bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik yang relevan sambil tetap mengikuti jalur diskusi yang telah ditetapkan.

2. Observasi

Observasi lapangan akan dilakukan di tempat-tempat penampungan migran dan pusat-pusat pelayanan imigrasi untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh migran. Observasi ini akan memberikan konteks tambahan untuk data yang diperoleh dari wawancara dan akan membantu peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan imigrasi di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga akan melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan publikasi dari lembaga non-pemerintah. Dokumentasi ini akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk memberikan dasar yang kuat bagi analisis kebijakan imigrasi di Indonesia.

Analisis Data

1. Teknik Analisis Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan konteks kebijakan imigrasi dan kriminalisasi migran. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman migran dan implikasi kebijakan.

2. Teknik Analisis Kuantitatif

Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik migran dan kasus kriminalisasi. Selain itu, analisis regresi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap kriminalisasi migran. Dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan imigrasi terhadap kriminalisasi migran di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kebijakan Imigrasi di Indonesia

1. Kebijakan yang Ada dan Implementasinya

Kebijakan imigrasi di Indonesia saat ini mencakup berbagai regulasi yang ditetapkan untuk mengatur arus migrasi. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, meskipun ada upaya untuk mempermudah proses pengajuan visa, banyak migran yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin tinggal yang sah. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 50% permohonan visa ditolak karena alasan administratif. Hal ini menciptakan situasi di mana banyak migran terpaksa tinggal di Indonesia tanpa dokumen yang sah, sehingga meningkatkan risiko kriminalisasi.

Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Migran

Dampak dari kebijakan imigrasi yang ada dapat terlihat dari meningkatnya jumlah migran yang mengalami kriminalisasi. Berdasarkan data dari IOM, sekitar 30% migran yang ditangkap di Indonesia pada tahun 2021 adalah mereka yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kebijakan yang ketat ini tidak hanya berdampak pada migran secara individu, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial antara migran dan komunitas lokal. Banyak migran yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses ke layanan dasar, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mereka.

Hubungan antara Kebijakan Imigrasi dan Kriminalisasi

1. Kasus-Kasus Kriminalisasi Migran

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus kriminalisasi migran yang mencolok di Indonesia. Misalnya, dalam kasus penangkapan 200 migran di Bali pada tahun 2021, banyak dari mereka adalah pencari suaka yang melarikan diri dari konflik di negara asal mereka. Penangkapan ini menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak mempertimbangkan situasi darurat yang dihadapi oleh migran. Kasus ini mencerminkan bagaimana kebijakan imigrasi yang ketat dapat berkontribusi pada kriminalisasi migran, yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalisasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi kriminalisasi migran di Indonesia antara lain kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak migran, dan stigma sosial yang melekat pada migran. Banyak petugas imigrasi yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi migran, sehingga mereka cenderung mengambil tindakan hukum tanpa mempertimbangkan konteks kemanusiaan. Selain itu, media sering kali memperkuat stereotip negatif tentang migran, yang dapat memperburuk stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

1. Dampak Terhadap Komunitas Migran

Kriminalisasi migran berdampak signifikan terhadap komunitas migran di Indonesia. Banyak migran yang mengalami isolasi sosial dan kehilangan akses ke layanan dasar karena status hukum mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah, lebih dari 60% migran melaporkan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan antara migran dan masyarakat lokal.

2. Dampak Terhadap Masyarakat Lokal

Dampak kriminalisasi migran juga dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketegangan antara migran dan penduduk setempat sering kali meningkat, terutama di daerah yang memiliki populasi migran yang besar. Stigma yang melekat pada migran dapat menyebabkan diskriminasi dan konflik sosial yang lebih luas. Selain itu, ketidakpastian hukum yang dialami oleh migran dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja migran.

DISKUSI

Interpretasi Hasil Penelitian

1. Hubungan antara Kebijakan dan Kriminalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara kebijakan imigrasi yang ketat dan fenomena kriminalisasi migran di Indonesia. Kebijakan yang lebih fokus pada penegakan hukum sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan dari migrasi, sehingga migran yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia.

2. Implikasi Sosial dari Kriminalisasi Migran

Kriminalisasi migran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan implikasi sosial yang lebih luas. Stigma dan diskriminasi terhadap migran dapat memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan pola-pola ketidakadilan yang lebih dalam di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang isu migrasi dan hak-hak migran untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Perbandingan dengan Negara Lain

1. Studi Kasus Negara-Negara Lain

Dalam konteks internasional, banyak negara menghadapi tantangan serupa terkait kebijakan imigrasi dan kriminalisasi migran. Misalnya, di Australia, kebijakan imigrasi yang ketat telah menyebabkan banyak pencari suaka ditahan di pusat-pusat penahanan. Namun, negara-negara seperti Kanada menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif, dengan kebijakan yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi migran. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi.

2. Pelajaran yang Dapat Diambil

Dari studi kasus negara lain, dapat diambil pelajaran bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu mengurangi kriminalisasi migran. Negara-negara

yang mengedepankan perlindungan hak-hak migran cenderung memiliki tingkat kriminalisasi yang lebih rendah dan hubungan yang lebih baik antara migran dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan pendekatan ini dalam reformasi kebijakan imigrasi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Kebijakan Imigrasi yang Lebih Inklusif

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan imigrasi yang lebih inklusif, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga memberikan perlindungan bagi migran. Kebijakan ini harus mencakup akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta mekanisme perlindungan bagi pencari suaka.

2. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan imigrasi. Hal ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak migran dan pentingnya perlindungan kemanusiaan. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap migran, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi di Indonesia yang ketat berkontribusi pada kriminalisasi migran, yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat hubungan yang jelas antara kebijakan yang fokus pada penegakan hukum dan stigma sosial yang dialami oleh migran. Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dampak kebijakan imigrasi terhadap migran dan perlunya reformasi kebijakan yang lebih manusiawi. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan dapat menciptakan sistem imigrasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada studi longitudinal yang mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan imigrasi dan dampaknya terhadap migran dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang pengalaman migran di daerah-daerah tertentu di Indonesia juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amnesty International. (2018). "The State of the World's Human Rights."
- [2] Bank Dunia. (2020). "Migration and Development Brief."
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). "Statistik Imigrasi dan Demografi."
- [4] Castles, S., & Miller, M. J. (2009). "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World."
- [5] International Organization for Migration (IOM). (2019). "World Migration Report."
- [6] Kementerian Hukum dan HAM. (2011). "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian."

- [7] Kementerian Pariwisata. (2020). "Laporan Tahunan Pariwisata Indonesia."
- [8] Mastrotillo, M., et al. (2016). "The Impact of Immigration on Social Cohesion."
- [9] Presiden Republik Indonesia. (2016). "Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi."
- [10] UNHCR. (2021). "Global Trends: Forced Displacement in 2020."

HALAMANN INI SENGAJA DIKOSONGKAN